



Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM Tanjungpinang) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” maka Balai KIPM Tanjungpinang menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOB, CDOIB) dan sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017, SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO 37001:2016 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2025. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Tanjungpinang untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2025 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai KIPM Tanjungpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2025. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang di tahun kedepannya.

Demikian RKT Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025
Plt.Kepala Balai KIPM Tanjungpinang



Arrofik, S.Pi.,M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
Pendahuluan.....	6
Latar Belakang.....	6
Tugas dan Peran Organisasi	6
Tujuan	8
Manfaat.....	9
Sasaran.....	9
Rencana Kinerja Tahunan	10
Rencana Strategis, Visi dan Misi.....	10
Arah Kebijakan.....	13
Sasaran Strategis BKIPM dan Indikator Kinerja.....	13
Penutup.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja BKIPM TA 2024.....	16
Tabel 2. Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang Tahun 2025.....	18
Tabel 3. Alokasi anggaran perkegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Balai KIPM Tanjungpinang tahun 2025	22

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BKIPM 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang tetap harus

menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen di atasnya (Renstra, RPJMN).

Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Perpres No. 02 Tahun 2017 tentang pengesahan pembaharuan dan pembentukan BKIPM menjadi Perpres No. 38 Tahun 2023 dalam Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan disetiap rantai pasok melalui quality assurance, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di

pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan surveillance. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Balai KIPM Tanjungpinang sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Balai KIPM Tanjungpinang cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2025.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang pada tahun 2025.

Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2025. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2025.

Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Balai KIPM Tanjungpinang adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM Balai KIPM Tanjungpinang tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) BKIPM Tahun Anggaran 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai KIPM Tanjungpinang pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,
- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: “Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan

Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BKIPM tahun 2025 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang perkarantina, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupan fungsi nya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat,

- 
- surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
 4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
 6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar

dan regulasi nasional.

2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan

negara berupa PNBK-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBK berbasis digital.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Balai KIPM Balikpapan telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, oleh karena itu Balai KIPM Tanjungpinang telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Kerja 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025 - 2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang TA 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	70
		5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (Nilai indeks)	3,36
SK.3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (Nilai indeks)	86
		7.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (Nilai)	82
		8.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	100
		9.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (Nilai)	93,76
		10.	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (Nilai)	71
		11.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	80
		12.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	80
		13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	80

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2. Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT BKIPM Tanjungpinang (%)	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan pangan lingkup UPT BKIPM Tanjungpinang (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT (%)	99
RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI KIPM TANJUNGPINANG TAHUN 2025				
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT BKIPM Tanjungpinang (%)	100
		5	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Tanjungpinang (Nilai)	87
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT BKIPM Tanjungpinang (%)	85
		7	Perentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Tanjungpinang (%)	70
		8	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT BKIPM Tanjungpinang (Nilai)	88

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT . Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu

antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (traceability) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja Balai KIPM BKIPM tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Balai KIPM Tanjungpinang tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 8.226.812.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Tanjungpinang untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Balai KIPM Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 202

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	7.776.812.000
2.	Manajemen Mutu	180.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	270.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025		8.226.812.000

Penutup

Rencana kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan BKIPM Tanjungpinang pada tahun 2025 sebesar **Rp. 8.226.812.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Hasil kelautan dan Perikanan Sebesar **Rp. 7.776.812.000,-**
2. Manajemen Mutu sebesar **Rp. 180.000.000,-**
3. **Pengendalian** dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp. 270.000.000,-**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TANJUNGPINANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Arrofik**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Tanjungpinang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Arrofik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TANJUNGPINANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	99
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Indeks)	87
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	85
		7.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	70
		8.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.776.812.000
2.	Manajemen Mutu	180.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	270.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2025		8.226.812.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Tanjungpinang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Arrofik

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			450,000,000	
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			270,000,000	
3989.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		5,000,000	
3989.BIA.001	Lokasi : KOTA BATAM				
051	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	1.0 Produk		5,000,000	U
A	Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan			5,000,000	
524111	Koordinasi Penanganan Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan			5,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5,000,000	A RM
	(KPPN.137-Batam)				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau) [5 org x 2 kali]	10.0 OH	370,000	3,700,000	*
	- Transportasi Laut/Sewa kapal	2.0 OK	650,000	1,300,000	*
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	100.0 produk, Sertifikat		170,000,000	
3989.PDC.002	Lokasi : KOTA BATAM				
051	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	100.0 produk		170,000,000	U
A	Validasi produk pada sektor produksi pasca panen			170,000,000	
521211	Prosentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) yang diterbitkan			30,000,000	
	Belanja Bahan			3,720,000	A RM
	(KPPN.137-Batam)				
	- ATK dan Komputer Supplies	1.0 PKT	1,710,000	1,710,000	*
	- Snack Rapat Biasa KEPULAUAN RIAU	30.0 OK	25,000	750,000	*
	- Makan Konsumsi Diklat (Riau)	30.0 OK	42,000	1,260,000	*
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			19,680,000	A RM
	(KPPN.137-Batam)				
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (KEPULAUAN RIAU) [2 ORG x 3 HARI]	6.0 OH	750,000	4,500,000	*
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Bisnis JAKARTA - BATAM	3.0 OK	4,000,000	12,000,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 3 HARI]	6.0 OH	530,000	3,180,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6,600,000	A RM
	(KPPN.137-Batam)				
	- Transportasi Kendaraan Laut	6.0 TRIP	750,000	4,500,000	*
	- Translok Perjalanan Inspeksi dan Verifikasi [2 org x 7 kali]	14.0 OK	150,000	2,100,000	*
B	Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar			70,000,000	
521211	Belanja Bahan			7,100,000	2 PNP
	(KPPN.137-Batam)				
	- ATK dan Komputer supplies	1.0 PKT	7,100,000	7,100,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam) - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (KEPULAUAN RIAU) - Transport dan Tiket Pulang Pergi Perjalanan - Rakor/Ratek/Diklat/Konsultasi - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau)	9.0 OH 3.0 OK 8.0 OH	792,000 3,004,000 370,000	19,100,000 7,128,000 * 9,012,000 * 2,960,000 *	A RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.137-Batam) - Transportasi Kendaraan Laut [5 ORG x 2 TRIP] - Translok Perjalanan Inspeksi dan Verifikasi [3 org x 2 kali x 5 LOK]	10.0 OK 30.0 OK	750,000 170,000	12,600,000 7,500,000 * 5,100,000 *	A RM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.137-Batam) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau) [2 ORG x 5 LOK x 3 KALI] - Tiket dan Transportasi Kegiatan [2 ORG x 5 LOK x 3 KALI]	30.0 OH 30.0 OH	370,000 670,000	31,200,000 11,100,000 * 20,100,000 *	A RM
C	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (sertifikat)			70,000,000	
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku (KPPN.137-Batam) - Bahan laboratorium	1.0 PKT	34,720,000	34,720,000 22,680,000	2 PNP A RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam) - Penginapan - Transport dan Tiket Pulang Pergi Perjalanan - Rakor/Ratek/Diklat/Konsultasi - Uang Harian	10.0 OH 3.0 OK 6.0 OH	750,000 3,950,000 555,000	7,500,000 * 11,850,000 * 3,330,000	A RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.137-Batam) - Transportasi Inspeksi HACCP - Translok Perjalanan Inspeksi dan Verifikasi [5 org x 6 kali]	10.0 OK 30.0 OK	750,000 170,000	12,600,000 7,500,000 * 5,100,000	A RM
3989.PDF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	9.0 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat		70,000,000	
3989.PDF.002	Lokasi : KOTA BATAM Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	9.0 Lembaga		70,000,000	
051	Validasi Sertifikasi Produksi Primer			70,000,000	U
A	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan			30,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.137-Batam) - ATK dan Komputer Supplies - Konsumsi kegiatan - Perlengkapan/seminar kit - Spanduk	1.0 PKT 30.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	1,570,000 67,000 1,810,000 520,000	5,910,000 1,570,000 * 2,010,000 * 1,810,000 * 520,000 *	2 PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.137-Batam) - Honor narasumber	1.0 OH	900,000	900,000	2 PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam) - Penginapan CPIB Kab.Lingga [3 ORG x 2 HARI] - Tiket Pulang Pergi Perjalanan CPIB - Uang Harian [3 ORG x 3 KALI]	6.0 OK 3.0 OK 9.0 OH	500,000 1,570,000 370,000	3,000,000 4,710,000 3,330,000	* * * A PNP
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.137-Batam) - Uang harian kegiatanInspeksi/Verifikasi CPIB [3 orang x 5 KALI x 3 LOK] - Transportasi kegiatan CPIB	45.0 OK 6.0 TRIP	170,000 750,000	7,650,000 4,500,000	* * A RM
B	Sertifikasi CPPIB			10,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.137-Batam) - ATK dan Komputer Supplies - Konsumsi kegiatan - Perlengkapan/seminar kit - Spanduk	1.0 PKT 30.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	1,000,000 67,000 1,500,000 370,000	1,000,000 2,010,000 1,500,000 370,000	* * * * 2 PNP
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.137-Batam) - Honor narasumber	1.0 OH	900,000	900,000	* A RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.137-Batam) - Uang harian kegiatanInspeksi/Verifikasi CPIB [4 orang x 2 kali x 2 LOK] - Transportasi Laut	16.0 OK 2.0 TRIP	170,000 750,000	2,720,000 1,500,000	* * A RM
C	Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan			30,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.137-Batam) - ATK dan Komputer Supplies - Konsumsi Bimtek - Perlengkapan/seminar kit - Spanduk	1.0 PKT 28.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	1,500,000 67,000 1,500,000 194,000	1,500,000 1,876,000 1,500,000 194,000	* * * * 2 PNP
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.137-Batam) - Honor narasumber	1.0 OH	900,000	900,000	* 2 PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Kepulauan Riau) [3 ORG x 3 LOK x 2 KALI] - Tiket dan Transportasi Kegiatan survey/inspeksi/verifikasi CPIB kapal perikanan	18.0 OH 18.0 OK	370,000 670,000	18,720,000 6,660,000 12,060,000	A * *
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.137-Batam) - Uang harian kegiatan/Inspeksi/Verifikasi CPIB [3 ORG x 2 KALI x 3 LOK] - Transportasi Laut	18.0 OK 3.0 TRIP	170,000 750,000	5,310,000 3,060,000 2,250,000	A * *
3989.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	18.0 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		25,000,000	
3989.QIC.002	Lokasi : KOTA BATAM UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	18.0 Lembaga		25,000,000	
051	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			25,000,000	U
A	Temu Teknis Sertifikasi Mutu			5,040,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam) - Transportasi dan Tiket pesawat kegiatan [1 OK] - Uang saku fullboard [1 org x 2 kali] - Uang harian peserta - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (KEPULAUAN RIAU)	1.0 OK 2.0 OK 1.0 OK 1.0 OH	3,500,000 130,000 530,000 750,000	5,040,000 3,500,000 260,000 530,000 750,000	A * * * *
B	Evaluasi Kesesuaian Penerbitan HC pada UPI			19,960,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam) - Uang Harian Perjalanan Dinas - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - Transportasi dan tiket kegiatan [2 OK]	2.0 OH 2.0 OK 2.0 OK	370,000 690,000 1,000,000	4,120,000 740,000 1,380,000 2,000,000	A * * *
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam) - Surveillance/verifikasi dalam kota [4 ORG x 4 KALI x 2 LOK]	32.0 OH	370,000	11,840,000	A *
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.137-Batam) - Perjalanan dinas surveillance/verifikasi [2 ORG x 10 LOK x 2 KALI]	40.0 OK	100,000	4,000,000	A *
7010	Manajemen Mutu			180,000,000	
7010.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	28.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		5,000,000	
7010.ABR.001	Lokasi : KOTA BATAM Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	28.0 Rekomendasi Kebijakan		5,000,000	
052	Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan			5,000,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Ekspor <i>Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</i>			5,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.137-Batam)			5,000,000	A PNP
	- Uang harian	1.0 OH	530,000	530,000	*
	- Transportasi Tiket Pulang Pergi Perjalanan Dinas	1.0 OK	4,080,000	4,080,000	*
	- Uang Harian	3.0 OH	130,000	390,000	*
7010.DCC	<u>Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]</u> Lokasi : KOTA BATAM	1.0 Orang, Kegiatan		6,500,000	
7010.DCC.001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.0 Kegiatan		6,500,000	
051	Peningkatan kompetensi inspektur mutu			6,500,000	U
A	<i>Pelatihan teknik audit dan pengambilan sampel</i>			6,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.137-Batam)			6,500,000	A PNP
	- uang saku fullboard	3.0 OH	130,000	390,000	*
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Bisnis BATAM - DENPASAR	1.0 OK	5,150,000	5,150,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali)	2.0 OH	480,000	960,000	*
7010.PBR	<u>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]</u> Lokasi : KOTA BATAM	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		95,000,000	
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	1.0 Rekomendasi Kebijakan		95,000,000	
051	Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji			95,000,000	U
A	<i>Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi dalam rangka Quality Assurance produk hasil perikanan</i>			95,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.137-Batam)			9,242,000	A RM
	- ATK dan Komputer Supplies	1.0 PKT	2,232,000	2,232,000	*
	- Konsumsi Rapat	30.0 PKT	67,000	2,010,000	*
	- Perlengkapan (Pembelian test kit (klorin tes, salinity tes, dll))	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	*
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.137-Batam)			72,000,000	A RM
	- Biaya uji banding	1.0 PKT	2,500,000	2,500,000	*
	- Iuran tahunan	1.0 OH	1,500,000	1,500,000	*
	- Uji profesiensi	4.0 PKT	1,500,000	6,000,000	*
	- Biaya Kalibrasi	1.0 PKT	48,000,000	48,000,000	*
	- Biaya Surveillance ISO 17025	4.0 OH	3,500,000	14,000,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam) - Tiket Pulang Pergi Perjalanan Rakor/Ratek/Diklat/Konsultasi - Uang Harian - Penginapan	2.0 OK 7.0 OH 4.0 OH	4,000,000 370,000 792,000	13,758,000 8,000,000 2,590,000 3,168,000	A * * *
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]	2.0 Lembaga, Unit Kerja		67,000,000	
7010.PDD.001	Lokasi : KOTA BATAM Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.0 Lembaga		25,000,000	
051	Penerapan Standar Metode Pengujian			25,000,000	U
A	Penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) lingkup Otoritas Kompeten			25,000,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.137-Batam) - Biaya Sertifikasi ISO 9001	1.0 PKT	25,000,000	25,000,000	2 PNP
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	1.0 Lembaga		42,000,000	
051	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi			42,000,000	U
A	Penerapan sistem manajemen mutu untuk mendukung sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan			42,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.137-Batam) - ATK dan Komputer Supplies - Konsumsi Rapat - Perlengkapan (Pembelian test kit (klorin tes, salinity tes, dll)) - Spanduk	1.0 PKT 60.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	750,000 67,000 1,500,000 250,000	750,000 4,020,000 1,500,000 250,000	A * * * *
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.137-Batam) - Pertanggungggugatan - Biaya Reakreditasi - Iuran Tahunan - Biaya pendaftaran	1.0 OK 4.0 OH 1.0 PKT 1.0 PKT	1,592,000 3,500,000 1,500,000 5,000,000	1,592,000 14,000,000 1,500,000 5,000,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam) - Penginapan - Transport dan Tiket Pulang Pergi Perjalanan Asesor - Uang Harian [3 HARI x 2 ORG]	4.0 OH 2.0 OK 6.0 OH	792,000 4,000,000 370,000	13,388,000 3,168,000 8,000,000 2,220,000	A * * *
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		6,500,000	
7010.QIA.001	Lokasi : KOTA BATAM Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	1.0 Produk		6,500,000	
051	Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance			6,500,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Quality Assurance			6,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			6,500,000	A
	(KPPN.137-Batam)				PNP
	- Penginapan	1.0 OH	792,000	792,000	*
	- Trasnpot dan Tiket Pulang Pergi Perjalanan Dinas	1.0 OK	4,838,000	4,838,000	*
	- Uang Harian	1.0 OH	480,000	480,000	*
	- Uang harian Fullboard	3.0 OH	130,000	390,000	*
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			7,776,812,000	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan			7,776,812,000	
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	13.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		7,624,172,000	

3987.EBA.962	Lokasi : KOTA BATAM	1.0 Layanan		212,400,000	
051	Layanan Umum			212,400,000	
A	Layanan Umum dan Rumah Tangga			72,840,000	
521211	Belanja Bahan			30,000,000	A
	(KPPN.137-Batam)				RM
	- ATK dan Komputer Supplies	4.0 PKT	2,500,000	10,000,000	*
	- Penggandaan dan Laporan	4.0 PKT	2,500,000	10,000,000	*
	- Bahan Percetakan	4.0 PKT	2,500,000	10,000,000	*
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			3,170,000	A
	(KPPN.137-Batam)				PNP
	- Bahan Percetakan	1.0 THN	3,170,000	3,170,000	*
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			26,070,000	A
	(KPPN.137-Batam)				RM
	- Penginapan [3 ORG x 2 KALI]	6.0 OH	730,000	4,380,000	*
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BATAM [3 KALI x 3 ORG]	9.0 OK	2,888,000	20,520,000	*
	- Uang Harian Fullboard [3 ORG x 3 KALI]	9.0 OH	130,000	1,170,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			13,600,000	A
	(KPPN.137-Batam)				PNP
	- Uang harian kegiatan dalam kota [10 ORG x 2 KALI x 4 LOK]	80.0 OH	170,000	13,600,000	*
B	Layanan Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan SDM			58,440,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			58,440,000	A
	(KPPN.137-Batam)				RM
	- Penginapan [6 ORG x 2 KALI]	12.0 OH	730,000	8,760,000	*
	- Uang Harian	12.0 OH	530,000	6,360,000	*
	- Tiket Pulang Pergi /Perjalanan Rakor/Ratek/Diklat/Konsultasi [5 ORG x 3 KALI]	15.0 OK	2,888,000	43,320,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional			41,480,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam)			41,480,000	A RM
	- Penginapan	10.0 OH	730,000	7,300,000	*
	- Uang Harian	10.0 OH	530,000	5,300,000	*
	- Tiket Pulang Pergi /Perjalanan Rakor/Ratek/Diklat/Konsultasi	10.0 OK	2,888,000	28,880,000	*
D	Operasional Pimpinan			39,640,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam)			39,640,000	A RM
	- Penginapan	20.0 OH	702,000	14,040,000	*
	- Tiket PP Konsultasi/Pertemuan Pembinaan Koordinasi	5.0 OK	3,000,000	15,000,000	
	- Uang Harian	20.0 OH	530,000	10,600,000	*
3987.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.0 Layanan		7,411,772,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,906,920,000	U
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			3,601,749,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.137-Batam)			1,360,000,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,200,000,000	1,200,000,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	80,000,000	80,000,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	80,000,000	80,000,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.137-Batam)			160,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	100,000	100,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	30,000	30,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	30,000	30,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.137-Batam)			61,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	50,000,000	50,000,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,500,000	5,500,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,500,000	5,500,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.137-Batam)			40,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	35,000,000	35,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,500,000	2,500,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,500,000	2,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.137-Batam)			24,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	20,000,000	20,000,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000,000	2,000,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000,000	2,000,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.137-Batam)			55,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,100,000	4,100,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	50,000,000	50,000,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	900,000	900,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.137-Batam)			5,500,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	500,000	500,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,300,000	2,300,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,700,000	2,700,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.137-Batam)			50,000,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	50,000,000	50,000,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.137-Batam)			150,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	150,000,000	150,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.137-Batam)			17,750,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	7,750,000	7,750,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,000,000	5,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,000,000	5,000,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.137-Batam)			200,000,000	RM
	- Biaya Uang Lembur Pegawai	1.0 THN	200,000,000	200,000,000	
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.137-Batam)			1,638,339,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai	1.0 THN	1,638,339,000	1,638,339,000	
B	<u>Gaji dan Tunjangan PPPK</u>			305,171,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.137-Batam)			95,300,000	RM
	- Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	81,686,400	81,686,000	
	- Gaji ke 13	1.0 BLN	6,807,200	6,807,000	
	- Gaji ke 14	1.0 BLN	6,807,200	6,807,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.137-Batam) - Pembulatan Gaji PPPK - Pembulatan Gaji Ke 13 - Pembulatan Gaji Ke 14	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	16,000 2,000 2,000	20,000 16,000 2,000 2,000	RM
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.137-Batam) - Belanja Tunjangan suami/istri - Tunjangan suami /istri (gaji ke 13) - Tunjangan suami/istri (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	35,544,000 370,360 370,360	36,284,000 35,544,000 370,000 370,000	RM
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.137-Batam) - Tunjangan anak PPPK - Tunjangan anak (gaji ke 13) - Tunjangan anak (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	1,548,000 129,000 129,000	1,806,000 1,548,000 129,000 129,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.137-Batam) - Tunjangan fungsional PPPK - Tunjangan Fungsional(gaji ke 13) - Tunjangan Fungsional (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	6,480,000 540,000 540,000	7,560,000 6,480,000 540,000 540,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.137-Batam) - Tunjangan beras PPPK	1.0 THN	7,216,320	7,216,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.137-Batam) - Uang Makan PPPK	1.0 THN	19,600,000	19,600,000	RM
512212	<u>Belanja Uang Lembur PPPK</u> (KPPN.137-Batam) - Lembur PPPK	1.0 THN	24,000,000	24,000,000	RM
512414	<u>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</u> (KPPN.137-Batam) - Tunjangan Kinerja PPPK	1.0 THN	113,385,660	113,385,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3,504,852,000	U
A	<i>Penambah daya tahan tubuh</i>			<i>75,240,000</i>	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.137-Batam) - Penambah Daya Tahan Tubuh (Kepulauan Riau)	3960.0 OH	19,000	75,240,000	A RM
B	<i>Pakaian Petugas BPPMHPK</i>			<i>34,916,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.137-Batam)			34,916,000	A RM
	- Pakaian Dinas Pegawai BPPMHPK (25 ORG x 2 STEL)	53.0 PEG	658,800	34,916,000	*
	<i>Jamuan Makan Tamu Rapat</i>			100,000,000	
C				100,000,000	A RM
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.137-Batam)			100,000,000	A RM
	- Jamuan Makan	1.0 THN	100,000,000	100,000,000	*
	<i>Atribut Pas Pelabuhan Laut dan Bandara</i>			2,700,000	
D				2,700,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.137-Batam)			2,700,000	RM
	- Atribut Pas Pelabuhan dan Bandara	9.0 OT	300,000	2,700,000	*
	<i>Perawatan Gedung Kantor</i>			286,600,000	
E				286,600,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.137-Batam)			186,600,000	A RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor dan Laboratorium	1000.0 M2	180,000	180,000,000	*
	- Pemeliharaan Halaman Gedung	600.0 M2	11,000	6,600,000	*
523133	<u>Belanja Pemeliharaan Jaringan</u> (KPPN.137-Batam)			100,000,000	A RM
	- Pemeliharaan Jaringan	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	*
	<i>Perbaikan Peralatan Kantor</i>			81,890,000	
F				81,890,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.137-Batam)			81,890,000	A RM
	- Pemeliharaan Printer dan scanner	25.0 UNIT	650,000	16,250,000	*
	- Pemeliharaan Komputer [20 UNIT x 1 KALI x 1 THN]	20.0 KALI	700,000	14,000,000	*
	- Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.0 PKT	10,000,000	10,000,000	*
	- Pemeliharaan AC	40.0 UNIT	600,000	24,000,000	*
	- Pemeliharaan Inventaris Lainnya	18.0 UNIT	500,000	9,000,000	*
G	- Pemeliharaan Genset	1.0 THN	8,640,000	8,640,000	*
	<i>Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4</i>			81,000,000	
				81,000,000	A RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.137-Batam)			81,000,000	A RM
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	6.0 UNIT	13,500,000	81,000,000	*
	<i>Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2</i>			52,298,000	
H				52,298,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.137-Batam)			52,298,000	A RM
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	20.0 UNIT	2,614,900	52,298,000	*
	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			467,293,000	
I				467,293,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.137-Batam)			407,293,000	A RM
	- Listrik	1.0 THN	407,293,000	407,293,000	*
				407,293,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.137-Batam)			10,000,000	A
	- Telepon	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	*
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.137-Batam)			50,000,000	
	- Air	1.0 THN	50,000,000	50,000,000	
J	Operasional Perkantoran dan Pimpinan			2,322,915,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.137-Batam)			1,300,200,000	A
	- BPJS [22 org x 12 bln]	264.0 ob	60,000	15,840,000	*
	- Honor Tenaga Pramubakti, Sopir dan Keamanan [22 org x 12 bln]	264.0 OB	3,620,000	955,680,000	*
	- THR Tenaga Pramubakti, Sopir dan Keamanan [22 org x 1 bln]	22.0 OB	3,620,000	79,640,000	
	- Lembur PPNPN [22 OB x 12 BLN]	264.0 OB	500,000	132,000,000	
	- Langganan Internet	1.0 PKT	98,349,000	98,349,000	
	- Langganan Google Drive	1.0 tahun	5,000,000	5,000,000	
	- Langganan Program Canva	12.0 bln	360,000	4,320,000	*
	- Langganan Koran	12.0 bln	500,000	6,000,000	*
	- Paket zoom meeting	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000	*
	- Biaya Meterai	1.0 PKT	120,000	120,000	
	- Laundry	1.0 PKT	95,000	95,000	
	- TV Kabel	1.0 PKT	156,000	156,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.137-Batam)			3,000,000	
	- Biaya Pengiriman Pos	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.137-Batam) - Honor Staf Sekretariat Pengelola Anggaran 36.0 OB 384,000 13,824,000 - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12.0 OB 390,000 4,680,000 - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12.0 OB 600,000 7,200,000 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12.0 OB 1,510,000 18,120,000 * - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12.0 OB 1,550,000 18,600,000 - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar) 12.0 OB 520,000 6,240,000 - Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta) 12.0 OB 370,000 4,440,000 - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta) 12.0 OB 300,000 3,600,000 - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta) 12.0 OB 230,000 2,760,000 > Pengelola SAI (UAKPA UAKPB) 12,000,000 - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang) 12.0 OB 200,000 2,400,000 - Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang) 12.0 OB 200,000 2,400,000 - Honorarium Ketua (UAKPA/Barang) 12.0 OB 150,000 1,800,000 - Honorarium Wakil Ketua (UAKPA/Barang) 12.0 OB 150,000 1,800,000 - Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) 24.0 OB 150,000 3,600,000 > Pengelola dan Penyimpan BMN 4,320,000 - Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang 24.0 OB 180,000 4,320,000			95,784,000 A	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.137-Batam) - Pengurusan Pajak dan Perpanjangan STNK 1.0 THN 10,000,000 10,000,000			10,000,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.137-Batam) - Perlengkapan Perkantoran 1.0 PKT 123,851,000 123,851,000 *			123,851,000 A	RM
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.137-Batam) - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 12.0 OB 680,000 8,160,000 *			8,160,000 A	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.137-Batam) - Keperluan Pokok Perkantoran 1.0 THN 100,000,000 100,000,000 *			100,000,000 A	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.137-Batam) - Sewa Domain 1.0 THN 5,000,000 5,000,000 * - Sewa Mesin Fotocopy 1.0 THN 12,000,000 12,000,000 * - Sewa Kendaraan 1.0 PKT 200,000 200,000			17,200,000 A	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.137-Batam)			664,720,000	A RM
	- THR Pegawai PJLP [12 ORG x 1 BLN]	12.0 ORG	3,620,000	43,440,000	
	- Gaji Pegawai Outsourcing [12 ORG x 12 BLN]	144.0 ORG	3,620,000	521,280,000	
	- Pengurusan IMB gedung kantor	1.0 PKT	100,000,000	100,000,000	*
3987.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	2.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		152,640,000	
3987.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		109,680,000	
051	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			109,680,000	U
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran			24,540,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.137-Batam)			4,536,000	A RM
	- ATK dan Komputer Supplies	1.0 PKT	4,536,000	4,536,000	*
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam)			20,004,000	A RM
	- Transport Pulang Pergi	6.0 OK	84,000	504,000	*
	- Penginapan	6.0 OH	730,000	4,380,000	*
	- Tiket Pulang Pergi Perjalanan Rakor/Ratek/Diklat/Pembinaan Koordinasi	4.0 OK	2,500,000	10,000,000	*
	- Uang Harian Fullboard	20.0 OH	130,000	2,600,000	*
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta)	6.0 OH	530,000	2,520,000	*
B	Konsultasi/Pertemuan Pembinaan Koordinasi			73,740,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam)			70,000,000	A RM
	- Transport Pulang Pergi	20.0 OK	190,000	3,800,000	*
	- Penginapan	20.0 OH	720,000	14,400,000	*
	- Tiket Pulang Pergi Konsultasi/Pertemuan Pembinaan Koordinasi	20.0 OH	2,060,000	41,200,000	*
	- Uang Harian	20.0 OH	530,000	10,600,000	*
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.137-Batam)			3,740,000	A RM
	- Translok Koordinasi/Rapat/Pertemuan Pembinaan Koordinasi [2 ORG x 11 LOK]	22.0 OK	170,000	3,740,000	*
C	Koordinasi/Konsultasi Pembinaan Keuangan			11,400,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.137-Batam)			11,400,000	A RM
	- Transport Pulang Pergi	10.0 OK	190,000	1,900,000	*
	- Penginapan	6.0 OH	720,000	4,320,000	*
	- Tiket Pulang Pergi Konsultasi/Pertemuan Pembinaan Koordinasi	2.0 OH	2,060,000	4,120,000	*
	- Uang Harian	2.0 OH	530,000	1,060,000	*
3987.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		42,960,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
UNIT KERJA (427649) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
ALOKASI Rp. 8,226,812,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
051	Layanan Manajemen Keuangan			42,960,000		
A	Koordinasi/Rekonsiliasi/Konsultasi/Pembinaan Manajemen Keuangan			42,960,000		
521211	Belanja Bahan			450,000	A	PNP
	(KPPN.137-Batam)					
	- ATK dan Komputer Supplies	1.0 PKT	450,000	450,000	*	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			24,320,000	A	PNP
	(KPPN.137-Batam)					
	- Penginapan	7.0 OH	730,000	5,110,000	*	
	- Tiket Pulang Pergi Perjalanan	6.0 OK	2,500,000	15,000,000	*	
	- Rakor/Ratek/Diklat/Pembinaan Koordinasi					
	- Uang Harian Fullboard	13.0 OH	130,000	1,690,000	*	
	- Uang Harian Full	6.0 OH	420,000	2,520,000	*	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			18,190,000	A	PNP
	(KPPN.137-Batam)					
	- Translok Koordinasi/Rapat/Pertemuan Pembinaan Koordinasi [107 ORG x 0 LOK]	107.0 OK	170,000	18,190,000	*	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Batam, 21 April 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Kantor

M.DARWIN SYAH PUTRA,S.PI,M.SI
IV/a 197801232003121001

